



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2025





BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
18. Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode sisa 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD (Perangkat Daerah) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) setelah disepakati dengan DPRD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII : PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun KUA dan PPAS.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 4 Juli 2024
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 4 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 16



RENCANA KERJA TAHUN 2025

BPBD KABUPATEN PASURUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026 yaitu **MENINGKATNYA PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH**, maka untuk mempercepat terwujudnya tujuan RPD tersebut diperlukan fokus pembangunan. Untuk tahun anggaran 2025 (tahun ke-2 RPD) fokus yang diambil adalah Meningkatkan Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Daerah, maka pemerintah daerah melalui semua Perangkat Daerah yang ada diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan visi misi pemerintah daerah, maka setiap Perangkat Daerah yang ada perlu menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya. Hal ini selain sebagai bentuk implementasi kepatuhan kepada pemerintah dan NKRI dengan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 Pasal 1, angka 30 dimana Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah, juga sebagai bentuk implementasi dan aktualisasi tindak lanjut riil pada RPJPD, RPD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD yang telah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena jalinan hubungan dan keterkaitan antara keseluruhan dokumen perencanaan yang ada tersebut saling bertautan dan saling mendukung satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Untuk penyusunan Renja Perangkat Daerah ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan mengacu pada dokumen yang terdiri atas: RPJPD, RPD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD.

Rencana Kerja atau disingkat RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RENJA Perangkat Daerah merupakan salah satu jenis Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKP. (Pasal 1, angka 30; dan Pasal 13 Ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Pada penyusunan Renja BPBD dilakukan melalui beberapa tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan sesuai dengan Pasal 16 ayat 2 Permendagri 86 Tahun 2017, yaitu:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan

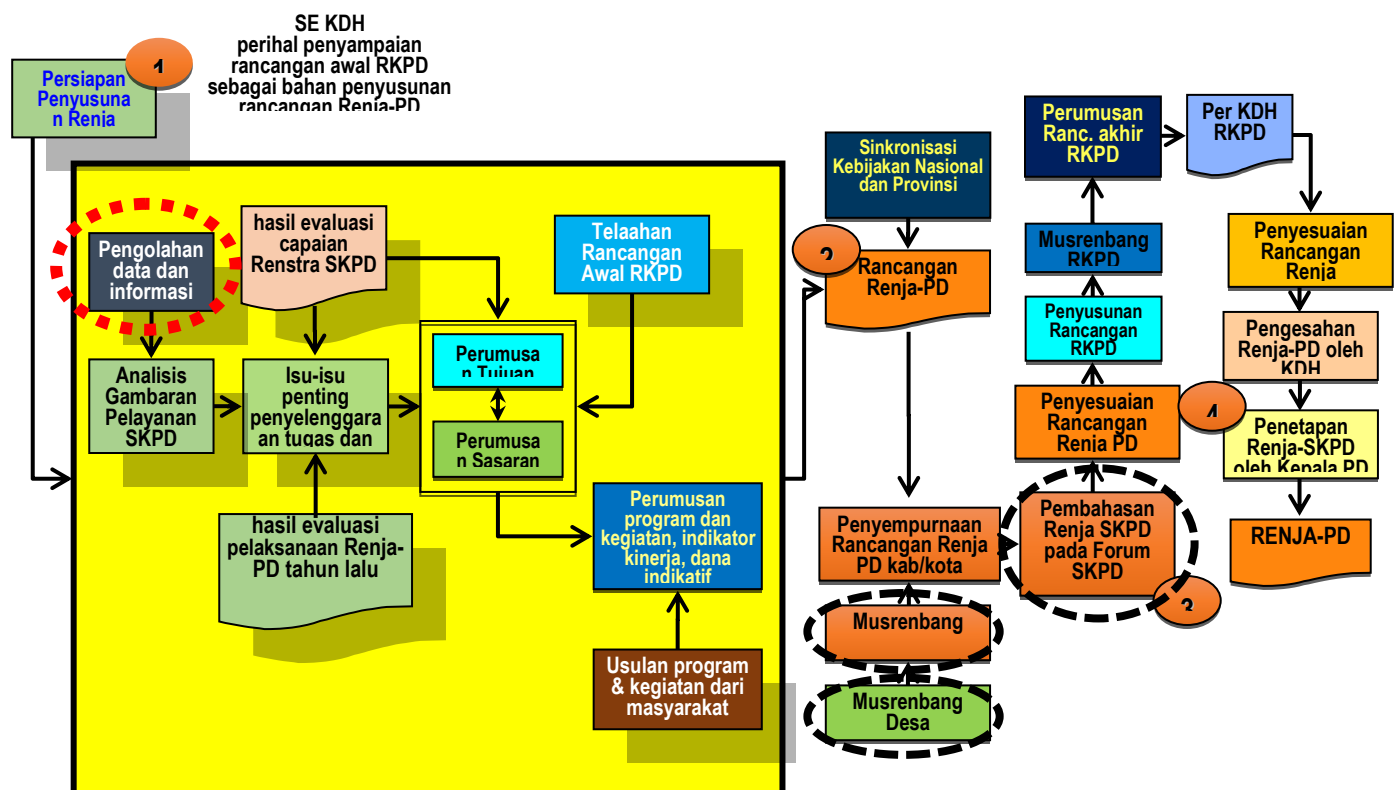
Untuk tatacara cara penyusunan renja sesuai dengan pasal 125 sampai dengan pasal 143 Permendagri 86 Tahun 2017 di bagi menjadi enam paragraf, yaitu sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah;

Adapun titik berat Rencana Kerja Perangkat Daerah BPBD pada tahun 2025 adalah upaya-upaya yang dapat mendukung peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, yaitu dengan peningkatan SDM aparatur Penanggulangan Bencana dan Masyarakat, peningkatan penguatan kapasitas masyarakat dan pelibatan peran serta masyarakat, lembaga usaha, kelompok rentan bencana dan elemen terkait lainnya mulai ormas, LSM, pemerhati kebencanaan, perguruan tinggi setempat, guru dan warga sekolah. Juga upaya pemenuhan kebutuhan standar minimal penanggulangan bencana, khususnya dalam hal pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Dengan kata lain dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan, khususnya kepada masyarakat yang terdampak bencana secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel, maka Rencana Kerja BPBD Tahun 2025 ini disusun sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD yang secara bertahap diharapkan dapat mendukung makin menguatnya kapasitas sebagai suatu lembaga, masyarakat yang berada di daerah rawan bencana serta mendukung keberlangsungan pembangunan daerah dalam bidang penanggulangan bencana sesuai RPD tahun 2024-2026, mulai dari tahap prabencana (pencegahan dan kesiapsiagaan), tahap tanggap darurat serta pada tahap pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).

Dengan demikian titik berat rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah BPBD Tahun 2025 yang berfokus pada upaya-upaya yang dapat mendukung pengurangan risiko bencana, ini nanti diharapkan sedapat mungkin juga bersinergi atau sinkron dengan Arah Kebijakan Strategis Nasional BNPB Tahun 2020-2024.



Bagan-1 Alur penyusunan RENJA Perangkat Daerah

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustaman Gender dalam Pemangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana Penanggulangan Bencana ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 –2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 - 2029 ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 152 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan.
27. Perbub RPD
28. Perbub renstra

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penangulangan Bencana Daerah (Renja BPBD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran rencana kerja yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan beserta pagu anggaran indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran pada satu tahun yang akan datang.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah:

- a. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen;
- b. Sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan sebagai dasar penyusunan APBD pada tahun anggaran 2025;
- c. Sebagai rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai dari sumber APBD Tahun 2025 untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
- d. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah :

- a. Dapat meningkatkan tertib administrasi kelembagaan (BPBD);
- b. Untuk penguatan kapasitas kelembagaan Penanggulangan Bencana;
- c. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur dan Masyarakat serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan dengan semua pihak yang berkompeten dan terkait dengan penanggulangan bencana pada tiga tahapan penanggulangan bencana;
- e. Meningkatkan pelayanan dan pemenuhan bantuan kebutuhan dasar korban bencana pada saat tanggap darurat bencana (banjir, longsor, angin puting beliung dan kekeringan);
- f. Meningkatkan percepatan pemulihan serta penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi kondisi daerah/ wilayah terdampak bencana, baik infrastruktur, sarana dan prasarana, serta permukiman warga masyarakat.
- g. Indikator masing-masing program dan kegiatan sesuai dengan output dan outcome, serta mendukung capaian kinerja yang ditetapkan;
- h. Rencana kebutuhan dan pengalokasian pagu anggaran pada masing-masing program/kegiatan dalam Renja Tahun 2025 dapat dipersiapkan sejak dini oleh Pemerintah Kabupaten (DPKD);
- i. Kode rekening anggaran sinkron dan tepat dengan jenis program/ kegiatan yang direncanakan dalam Renja Tahun 2025, sehingga kesalahan dapat dihindari;
- j. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, terpadu dan menyeluruh;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang : Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Landasan Hukum: Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3. Maksud dan Tujuan: Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4. Sistematika Penulisan: Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
4. Tantangan yang berasal dari luar BPBD tetapi masih ada keterkaitan dengan penanganan bencana (tantangan nasional dari BNPB) serta peluang yang ada dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; (telaahan terhadap rancangan awal RKPD).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan

tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

- 3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misalnya:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
2. Pencapaian MDGs,
3. Pengentasan kemiskinan,
4. Pencapaian SPM,
5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
6. Pengembangan daerah terisolir,
7. Dsb.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPBD TAHUN LALU (2023)

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN LALU (2023)

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPBD tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024) yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan / atau realisasi APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 yaitu ada 4 antara lain:

- 1) Persentase Desa / Kelurahan yang Mendapatkan Sosialisasi Antisipasi Bencana di Kawasan Rawan Bencana, diawal Perjanjian Kinerja BPBD menentukan target sebesar 50% kemudian pada Perjanjian Kinerja Perubahan sebesar 62,50%, realisasi dan capaian kinerja diakhir tahun 2023 sebesar 66,25% dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 53.
- 2) Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana, BPBD menentukan target 25% sebanyak 20 desa/kelurahan pada Perjanjian Kinerja, realisasi dan capaian kinerja diakhir tahun 2023 sebesar 100% sebanyak 20 desa/kelurahan.
- 3) Persentase Korban Bencana Tertangani, BPBD menargetkan 100% pada Perjanjian Kinerja, realisasi dan capaian kinerja diakhir tahun 2023 sebesar 100% sebanyak 92.832 korban yang tertangani.
- 4) Persentase Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Dampak Bencana, BPBD menargetkan 100% pada Perjanjian Kinerja, realisasi dan capaian kinerja diakhir tahun 2023 sebesar 100% sebanyak 223 unit.
- 5) Pada tahun 2023 target nilai SAKIP sebesar 80,70 dan tercapai sebesar 80,70. Capaian melebihi target sehingga persentase capaian sebesar 100%

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (2023) sebagai berikut : target tahun 2023 sebesar 0,74 tercapai 0,74. Capaian

sesuai sehingga persentase capaian 100%, untuk tahun 2023 target nilai SAKIP sebesar 80,70 dan tercapai sebesar 80,70. Capaian sesuai target sehingga persentase capaian sebesar 100%.

Capaian pelaksanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 secara keseluruhan tercapai 100% dengan realisasi anggaran sebesar 97,47. Adapun realisasi kinerja untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Realisasi anggaran pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023 tercapai anggaran sebesar 96,27% dan realisasi Rencana Kerja 2023 tercapai 100%, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi anggaran sebesar 99.96% dan tercapai kinerja 100% dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD terealisasi anggaran sebesar 99.96% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terealisasi anggaran sebesar 94,99% dan tercapai kinerja 100% dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi anggaran sebesar 94,93% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN terealisasi anggaran sebesar 95,32% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD realisasi anggaran sebesar 95,15% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terealisasi anggaran sebesar 97,80% dan tercapai kinerja 100% dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya terealisasi anggaran sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi terealisasi anggaran sebesar 97,71% dan realisasi kinerja sebesar 100%;

- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi anggaran sebesar 99,75% dan tercapai kinerja 100% dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terealisasi anggaran sebesar 99,94% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi anggaran sebesar 97,52% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor terealisasi anggaran sebesar 99,93% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan terealisasi anggaran sebesar 99,77% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan terealisasi anggaran sebesar 97,35% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 6) Fasilitas Kunjungan Tamu terealisasi anggaran sebesar 99,80% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi anggaran sebesar 99,98% dan realisasi kinerja sebesar 100%.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasi anggaran sebesar 99,33% dan tercapai kinerja 100% dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terealisasi anggaran sebesar 0% dan realisasi kinerja sebesar 0% dikarenakan tidak ada anggarannya;
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya realisasi anggaran sebesar 99,33% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi anggaran sebesar 88,24% dan tercapai kinerja 100% dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi anggaran sebesar 99,65% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi anggaran sebesar 86,93% dan realisasi kinerja sebesar 100%;

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi anggaran sebesar 99,52% dan tercapai kinerja 100% dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi anggaran sebesar 99,61% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terealisasi anggaran sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya realisasi anggaran sebesar 98,47% dan realisasi kinerja sebesar 100%;

2. Program Penanggulangan Bencana.

Realisasi anggaran pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana tahun 2023 tercapai anggaran sebesar 98,39% dan realisasi Rencana Kerja 2023 tercapai 100%, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota terealisasi anggaran sebesar 98,08% dan tercapai kinerja 100% dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota realisasi anggaran sebesar 99,65% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 2) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota realisasi anggaran sebesar 98,08% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
- b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana terealisasi anggaran sebesar 98,94% dan tercapai kinerja 100% dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota terealisasi anggaran sebesar 98,56% dan tercapai kinerja sebesar 100%;
 - 2) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota terealisasi anggaran sebesar 98,57% dan tercapai kinerja sebesar 100%;

- 3) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota terealisasi anggaran sebesar 99,91% dan tercapai kinerja sebesar 100%;
 - 4) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana realisasi anggaran sebesar 99,38% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 5) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota realisasi anggaran sebesar 99,66% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 6) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan realisasi anggaran sebesar 99,29% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 7) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota realisasi anggaran sebesar 98,78% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 8) Penyusunan Rencana Kontijensi terealisasi anggaran sebesar 98,12% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 9) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana terealisasi anggaran sebesar 99,65% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 10) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam terealisasi anggaran sebesar 99,35% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
- c. Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana terealisasi anggaran sebesar 97,17% dan tercapai kinerja 100% dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota teralisasi anggaran sebesar 99,25% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 2) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota terealisasi anggaran sebesar 70,09% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 3) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota realisasi anggaran sebesar 99,23% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 4) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana terealisasi anggaran sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 100%.
- d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana terealisasi anggaran sebesar 99,61% dan tercapai kinerja 100% dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota terealisasi anggaran sebesar 99% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
- 2) Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota terealisasi anggaran sebesar 99% dan realisasi kinerja sebesar 100%.
- 3) Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota terealisasi anggaran sebesar 99% dan realisasi kinerja sebesar 100%.
- 4) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan terealisasi anggaran sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 100%.
- 5) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terealisasi anggaran sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 100%.
- 6) Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota terealisasi anggaran sebesar 99,61% dan realisasi kinerja sebesar 100%.

Sebagai evaluasi, hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Renja BPBD) Kabupaten Pasuruan tahun 2023 dapat dikatakan menunjukkan capaian kinerja yang baik. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2024 (sedang berjalan) nanti hasilnya juga diharapkan tercapai minimal sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu :

- a. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dengan target sebesar 0,21%.
- b. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan target sebesar 3,05 %.
- c. Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban dengan target sebesar 100%.
- d. Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun dengan target sebesar 100%.

Sedangkan untuk evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja TA 2024

Tahun anggaran 2024, BPBD Kabupaten Pasuruan memiliki Sasaran Strategis Perangkat Daerah yaitu :

1. Meningkatnya Kemampuan Daerah/Kapasitas Penanggulangan Bencana;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;

dengan Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut :

1. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) target sebesar 0,745;
2. Nilai SAKIP target sebesar 81,50

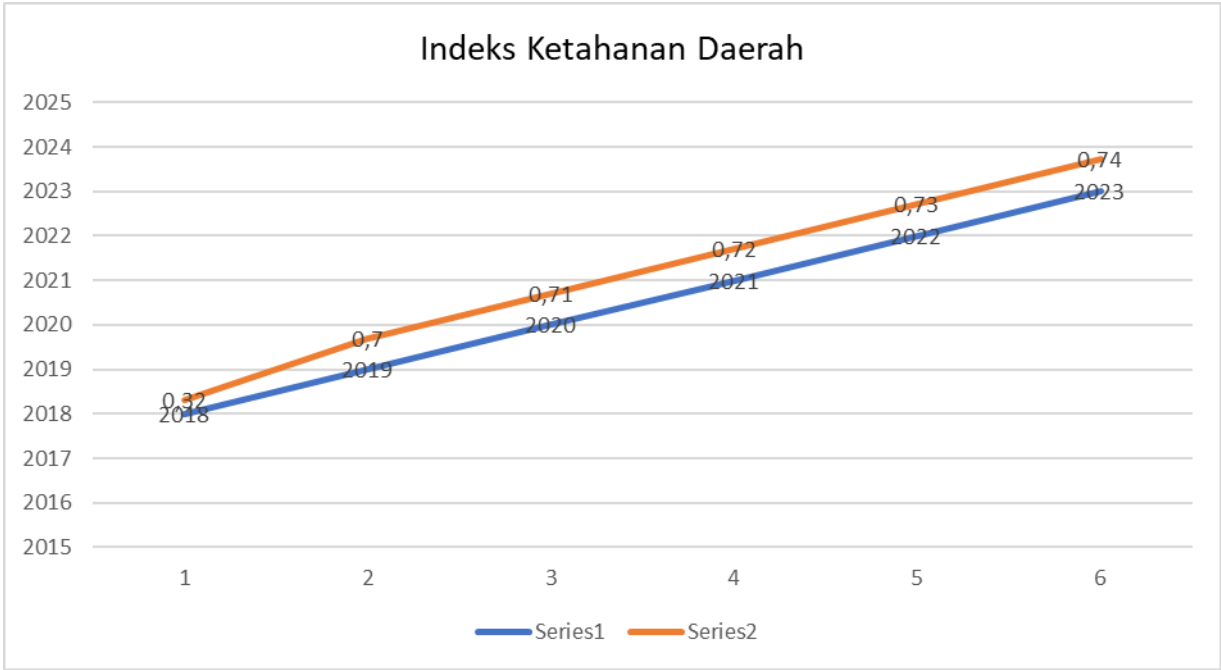
Sasaran Strategis Meningkatnya kemampuan daerah/kapasitas penanggulangan bencana dengan 1 Indikator Kinerja Sasaran :

➤ **Indeks Ketahanan Daerah**

Indeks Ketahanan Daerah merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi kota/kabupaten dan propinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan peta kapasitas dan selanjutnya dapat memutakhirkan peta risiko bencana. Dari IKD setiap kota/kabupaten dan propinsi mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tidak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko bencana. Untuk realisasi tahun 2021 naik menjadi 0,72 yang di tahun 2020 0,71 sedangkan tahun 2022 sebesar 0,73 sedangkan di 2018 nilai IKD Kabupaten Pasuruan adalah 0,32 dan pada tahun 2023 nilai IKD sebesar 0.74.

Nilai IKD Kabupaten Pasuruan						
KABUPATEN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
KABUPATEN PASURUAN	0.32	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74

Gambar 3.1 Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruan dari tahun 2018



Gambar 3.1 Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruandari tahun 2018

Adapun perbandingan Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Pasuruan terhadap kota / kabupaten lain di Jawa Timur pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah, sebagaimana table tersebut bahwa di tahun 2023 Kabupaten Pasuruan menempati urutan ke 6 tertinggi dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur , dimana Kabupaten Pamekasan dan Kab. Sidoarjo dengan nilai tertinggi sebesar 0,79 yang ke dua Kab. Lumajang dengan nilai 0,78, untuk Kota Kediri di posisi keempat dengan nilai IKD sebesar 0,77 dan disusul urutan ke lima oleh Kabupaten Mojokerto sebesar 0,76 dan Kabupaten Pasuruan dengan nilai 0,74 di urutan ke enam. Sedangkan untuk nilai IKD Propinsi di tahun 2023 sebesar 0,61. Kabupaten Pasuruan dengan nilai IKD 0,74 sudah diatas nilai Propinsi serta diatas rata rata kabupaten kota se Jawa Timur.

NO	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	PACITAN	0,70	0,57	0,55	0,66	0,71	0,71
2	PONOROGO	0,47	0,45	0,50	0,54	0,53	0,55
3	TRENGGALEK	0,59	0,58	0,58	0,56	0,60	0,63
4	TULUNGAGUNG	0,67	0,57	0,58	0,65	0,64	0,65
5	BLITAR	0,40	0,43	0,52	0,56	0,58	0,60
6	KEDIRI	0,45	0,52	0,50	0,54	0,59	0,63
7	MALANG	0,63	0,51	0,51	0,55	0,58	0,64
8	LUMAJANG	0,57	0,70	0,76	0,75	0,75	0,78
9	JEMBER	0,46	0,40	0,71	0,55	0,56	0,55
10	BANYUWANGI	0,77	0,61	0,68	0,69	0,69	0,70
11	BONDOWOSO	0,32	0,34	0,72	0,76	0,55	0,60
12	SITUBONDO	0,32	0,44	0,70	0,71	0,72	0,73
13	PROBOLINGGO	0,71	0,30	0,55	0,60	0,60	0,59
14	PASURUAN	0,32	0,70	0,71	0,72	0,73	0,74
15	SIDOARJO	0,67	0,67	0,66	0,73	0,78	0,79
16	MOJOKERTO	0,32	0,57	0,61	0,69	0,70	0,76
17	JOMBANG	0,32	0,40	0,35	0,42	0,47	0,41
18	NGANJUK	0,32	0,52	0,54	0,54	0,56	0,64
19	MADIUN	0,32	0,53	0,26	0,39	0,42	0,35
20	MAGETAN	0,32	0,43	0,24	0,59	0,64	0,66
21	NGAWI	0,32	0,32	0,38	0,38	0,44	0,50
22	BOJONEGORO	0,46	0,51	0,53	0,56	0,59	0,59
23	TUBAN	0,32	0,32	0,42	0,46	0,48	0,51
24	LAMONGAN	0,51	0,59	0,56	0,62	0,70	0,65
25	GRESIK	0,55	0,57	0,57	0,61	0,57	0,65
26	BANGKALAN	0,43	0,40	0,51	0,56	0,58	0,58
27	SAMPANG	0,32	0,35	0,43	0,47	0,55	0,62
28	PAMEKASAN	0,32	0,20	0,30	0,63	0,79	0,79
29	SUMENEP	0,32	0,37	0,62	0,53	0,61	0,63
30	KOTA KEDIRI	0,32	0,51	0,52	0,65	0,76	0,77
31	KOTA BLITAR	0,32	0,38	0,49	0,31	0,40	0,43
32	KOTA MALANG	0,32	0,44	0,44	0,56	0,72	0,61
33	KOTA PROBOLINGGO	0,32	0,50	0,59	0,55	0,38	0,41
34	KOTA PASURUAN	0,32	0,58	0,46	0,45	0,47	0,48
35	KOTA MOJOKERTO	0,32	0,25	0,42	0,42	0,42	0,42
36	KOTA MADIUN	0,32	0,41	0,25	0,25	0,35	0,46
37	KOTA SURABAYA	0,32	0,37	0,37	0,42	0,45	0,56
38	KOTA BATU	0,32	0,56	0,51	0,53	0,56	0,64
	IKD KAB/KOTA	0,42	0,47	0,52	0,56	0,58	0,61

Tabel 3.5 Perbandingan Nilai Indeks Ketahanan Daerah KabupatenPasuruan terhadap Kota / Kabupaten lain di Jawa Timur

Adapun Indikator Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun anggaran 2021 adalah Indeks Resiko Bencana (IRB). Pada tahun 2021 terdapat angka penurunan Indeks Resiko Bencana sebesar 17,08 yaitu angka Indeks Resiko Bencana tahun 2020 sebesar 156,26 turun menjadi angka Indeks Resiko Bencana tahun 2021 sebesar 139,18. Dan pada tahun 2022 nilai IRB Kabupaten Pasuruan sebesar 126,32 ada penurunan nilai IRB dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 12,86 sedangkan nilai IRB di tahun 2023 sebesar 116,77 ada penurunan nilai IRB dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 9,55.

Dalam menekan angka Indeks Resiko Bencana tahun 2023 dikatakan berhasil karena Indeks Resiko Bencana sudah mengalami penurunan sebesar 9,55.

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	PACITAN	215,2	215,2	192	126,2	123,1	121,3	116,4	111,1	107
2	PONOROGO	155,2	155,2	155,2	140,8	127,1	115,6	106,5	99,83	94,24
3	TRENGGALEK	198	198	198	170,9	151,3	151,3	151,3	136	124
4	TULUNGAGUNG	201,2	201,2	201,2	169,8	151,4	137,7	126,3	118	111,3
5	BLITAR	210	210	210	198,1	178,4	160,3	146,1	134,9	125,8
6	KEDIRI	178	178	178	163,1	144,4	131,5	121,5	112,5	104,5
7	MALANG	219,2	219,2	199,8	142,1	137,1	133,2	128,8	124,3	118,6
8	LUMAJANG	231,2	231,2	200,8	129,7	123,8	117,8	113,8	110,5	107
9	JEMBER	219,2	219,2	219,1	198,8	182,2	158,2	146,3	137,2	130,2
10	BANYUWANGI	219,2	208,7	206,4	168,3	151,9	137,9	127,8	120,3	114,1
11	BONDOWOSO	166	166	166	166	151	128,8	112,4	105,2	98,38
12	SITUBONDO	168,4	168,4	168,4	168,4	149,4	128,4	113,5	102,4	94,11
13	PROBOLINGGO	194,00	194,00	194,00	162,3	156,7	141,2	128,9	119,7	113
14	PASURUAN	214	214	214	214	180,3	156,3	139,2	126,3	116,8
15	SIDOARJO	149,6	149,6	132	85,29	81,62	79,15	75,95	72,69	69,88
16	MOJOKERTO	163,6	163,6	163,6	163,6	140,9	123,7	110,1	99,84	91,17
17	JOMBANG	154,8	154,8	154,8	154,8	138,4	128,6	119,2	110,2	105,2
18	NGANJUK	152,8	152,8	152,8	152,8	132,9	118,2	107,9	99,67	91,75
19	MADIUN	155,2	155,2	155,2	155,2	134,8	130,2	121,4	113,5	109,4
20	MAGETAN	152,8	152,8	152,8	152,8	135,8	131,3	115,7	103,5	94,17
21	NGAWI	143,2	143,2	143,2	143,2	131,1	120	120	109,7	100,3
22	BOJONEGORO	150	104,7	101,4	96,93	93,63	90,44	87,55	84,39	81,79
23	TUBAN	175,2	175,2	175,2	175,2	160,4	145	133	123,1	114,8
24	LAMONGAN	174,00	174,00	167,4	139,6	125,3	115,9	107,5	99,5	94,48
25	GRESIK	175,2	137,8	126,8	101,4	99,29	99,29	96,5	94,89	91,42
26	BANGKALAN	164,4	164,4	158,7	139	129,5	118,7	109,6	102,1	96,45
27	SAMPANG	154,8	154,8	154,8	154,8	140,6	127,2	116,4	106,2	97,01
28	PAMEKASAN	180,4	180,4	180,4	180,4	172,5	160,2	139,5	120,9	107,4
29	SUMENEP	204,8	204,8	204,8	204,8	184,6	160,4	146,2	133,3	123,1
30	KOTA KEDIRI	140,8	140,8	140,8	140,8	122,8	109,7	97,63	86,98	79,1
31	KOTA BLITAR	132	132	132	132	118,8	106,1	102,7	96,75	91,12
32	KOTA MALANG	113,6	113,6	113,6	113,6	100,8	91,26	82,25	73,13	68
33	KOTA PROBOLINGGO	148,4	148,4	148,4	148,4	129,8	114,2	104,1	101,3	97,72

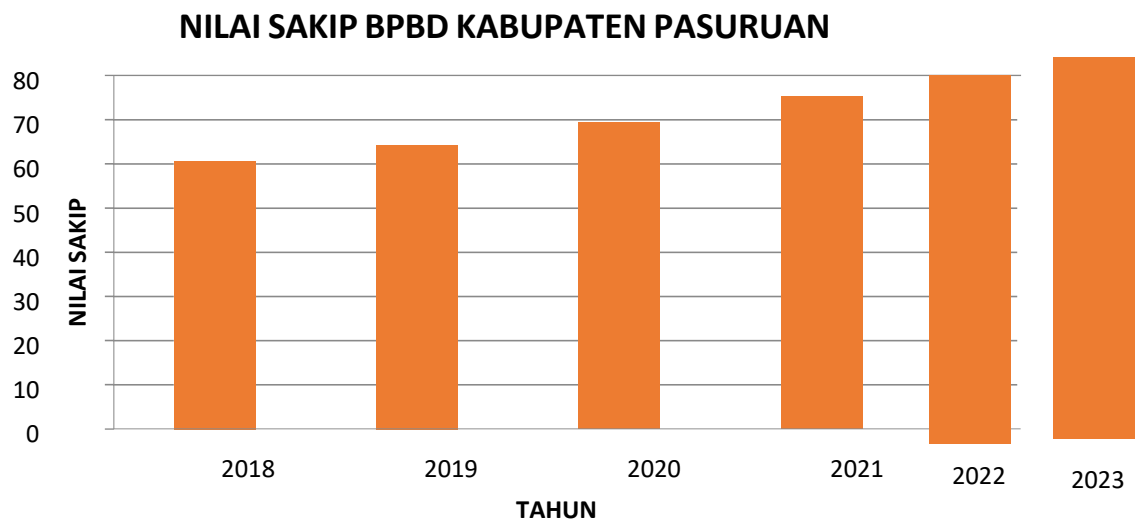
34	KOTA PASURUAN	158,4	158,4	158,4	158,4	136,2	123,7	115,2	108,1	102,3
35	KOTA MOJOKERTO	142,8	142,8	142,8	142,8	134	120,6	120,6	110,6	103
36	KOTA MADIUN	136	136	136	136	121,3	116,7	116,7	108,9	99,64
37	KOTA SURABAYA	166,8	166,8	166,8	166,8	150,3	150,3	136,4	124,9	113,3
38	KOTA BATU	134,4	134,4	134,4	134,4	116,1	104,1	95,31	88,04	81,05
		171,4	168,9	165,8	152,4	137,9	126,4	117,3	108,7	101,7

**Tabel 3.6 Perbandingan Nilai Indeks Risiko Bencana
Kabupaten Pasuruanterhadap Kota / Kabupaten lain di Jawa
Timur**

IRB Kabupaten Pasuruan dengan nilai 116,80 pada tahun 2023 membuat Kabupaten Pasuruan berada di posisi 35 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk nilai IRB nya, untuk IRB terbesar di peroleh oleh Kabupaten Jember sebesar 130,23 kemudian nomer 37 dengan nilai 125,76 oleh Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek dengan nilai 124 di posisi 36 serta kabupaten Sumenep dengan nilai 123,13 di posisi 35. Sedangkan untuk IRB Provinsi Jawa Timur sebesar 101,65

Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dengan 1 Indikator Kinerja Sasaran : Nilai SAKIP.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini adalah sesuatu yang sangat penting dan strategis bagi penyelenggaraan suatu negara, karena instansi pemerintah dipacu untuk terus meningkatkan kualitas kinerjanya sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya. Dalam pelaksanaan di lapangan, SAKIP juga menguji akuntabilitas seluruh proses yang berlangsung melalui kegiatan evaluasi atas implementasinya sehingga teruji kebenarannya. Adapun realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan dengan nilai 75,16 dengan kategori BB yang sebelumnya 69,35 dengan kategori B dan di tahun 2022 BPBD memperoleh nilai 80,63 dengan kategori A dan pada tahun 2023 nilai SAKIP BPBD sebesar 80,70.



Gambar 3.2 Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan dari tahun 2018

Dari tabel capaian kinerja di atas dapat dianalisis dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Indikator Kesatu, yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana;

Badan penanggulangan Bencana Daerah mempunyai indikator kinerja sasaran pada tahun 2023 yaitu ada 4 anatara lain :

- 1) Persentase Desa / Kelurahan yang Mendapatkan Sosialisasi Antisipasi Bencana di Kawasan Rawan Bencana, diawal Perjanjian Kinerja BPBD menentukan target sebesar 50% kemudian pada Perjanjian Kinerja Perubahan sebesar 62,50%, realisasi dan capaian kinerja diakhir tahun 2023 sebesar 66,25% dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 53.
- 2) Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana, BPBD menentukan target 25% sebanyak 20 desa/kelurahan pada Perjanjian Kinerja, realisasi dan capaian kinerja diakhir tahun 2023 sebesar 25% sebanyak 20 desa/kelurahan
- 3) Persentase Korban Bencana Tertangani, BPBD menargetkan 100% pada Perjanjian Kinerja, realisasi dan capaian kinerja diakhir tahun 2023 sebesar 100% sebanyak 92.832 korban yang

tertangani.

- 4) Persentase Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Dampak Bencana, BPBD menargetkan 100% pada Perjanjian Kinerja, realisasi dan capaian kinerja diakhir tahun 2023 sebesar 100% sebanyak 223 unit.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (2023) sebagai berikut : target tahun 2023 sebesar 0,74 tercapai 0,74. Capaian sesuai sehingga persentase capaian 100%.

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini (2021) dengan capaian tahun lalu (2020) adalah sebagai berikut : capaian kinerja tahun 2021 sebesar 0,72 dikatakan naik dari tahun 2020 yang sebesar 0,71, pada tahun 2022 sebesar 0,73 dan pada tahun 2023 capaian kinerja sebesar 0,74.

2. Pada Indikator Kedua, yaitu Nilai SAKIP;

- 1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun (2021) sebagai berikut : target tahun 2021 sebesar 72,50 tercapai 75,16. Capaian melebihi target sehingga persentase capaian sebesar 103,67%. Pada tahun 2022 target nilai SAKIP sebesar 77,50 dan tercapai sebesar 80,63. Pada tahun 2023 target nilai SAKIP sebesar 80,70 dan tercapai sebesar 80,70. Perbandingan antara target dan realisasi tercapai 100%.
- 2) Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun (2022) dan capaian tahun (2021) adalah sebagai berikut : capaian kinerja tahun 2022 sebesar 80,63 pada tahun 2021 sebesar 75,16, tahun 2020 sebesar 69,35. Sedangkan pada tahun 2023 ada peningkatan sebesar 0,07 sehingga nilai SAKIP BPBD sebesar 80,70.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			sesuai target akhir periode 2026 (bukan target 2026)	tdk perlu diisi	tdk perlu diisi	tdk perlu diisi		sesuai DPA 2024		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

(diisi)	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Layanan dan Regulasi Penanggulangan Bencana	100%					100%	100%	100,00%
1.05.03.2.01	<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana</i>	9.960 Orang (249 Kegiatan)					3320 Orang	3320 Orang	33,33%
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen							
1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal						0	0	0,00%

1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	9.960 Orang							
-----------------	---	---	-------------	--	--	--	--	--	--	--

1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan Sosialisasi, bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun						1520 Orang	1520 Orang	33,33%
1.05.03.2.02	<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>	<i>Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>	100%					1067 Orang	1067 Orang	#DIV/0!

1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen							
1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal						1 Dokumen	1 Dokumen	#DIV/0!
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	2.520 Orang							
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana						840 Orang	840 Orang	33,33%

1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	36 Dokumen; 6 unit EWS							
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya						12 Laporan	12 Laporan	33,33%
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	39 Unit							

1.05. 03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya						13 Unit	13 Unit	33,33%
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	3 Dokumen							
1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani						1 Kegiatan	1 Kegiatan	33,33%

1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	12 Kawasan							
1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana						4 Kawasan	4 Kawasan	33,33%
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	90 Orang							
1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya						30 Orang	30 Orang	33,33%
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	4 Dokumen							

1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi						0	0	33,33%
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	1.050 Orang							
1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan						1000 Orang	1000 Orang	33,33%
1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	3 Dokumen							
1.05.03.2.02.0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi						1 Dokumen	1 Dokumen	33,33%

1.05.03.2.02.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 Keluarga							
1.05.03.2.02.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						20 Keluarga	20 Keluarga	100,00%
1.05.03.2.03	<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	<i>Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Bantuan Sosial serta Penyelamatan dan Evakuasi Korban</i>	100%					100%	100%	100,00%
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	3 Laporan							

1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas						1 Laporan	1 Laporan	100,00%
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	45 Dokumen							
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat						10 Dokumen	10 Dokumen	100,00%

1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	3.000 Orang							
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana						1000 Orang	1000 Orang	100,00%
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang							
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						200 Orang	200 Orang	100,00%

1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3 Laporan							
1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota						1 Laporan	1 Laporan	100,00%
1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	3 Dokumen							

1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu						1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal								
1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis								

1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	6 Laporan							
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	3 Dokumen							
1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah						1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	3 Dokumen							
1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah						1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%

1.05.03.2.04.03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 Dokumen							
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana						1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	3 Dokumen							
1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia						1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	3 Laporan							

1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana						1 Laporan	1 Laporan	100,00%
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	12 Dokumen							

1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun						1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi								

1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)								
1.05.03.2.04.0009	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal								

1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan								
-------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal								
1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana								

X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%					100%	100%	100,00%
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun</i>	3 Dokumen					1 Laporan	1 Laporan	100,00%
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan							

X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1 Laporan	1 Laporan	100,00%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	100%					100%	100%	100,00%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	648 Orang-Bulan							
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						156 Orang/Bulan	156 Orang/Bulan	100,00%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen							

X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen							
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	100%					100%	100%	100,00%
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60 Paket							
X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0	0	

X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	61 Orang							
X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						31 Orang	31 Orang	100,00%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%					100%	100%	100,00%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45 Paket							
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						15 Paket	15 Paket	100,00%

X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	106 Paket							
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						46 Paket	46 Paket	100,00%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150 Paket							
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						75 Paket	75 Paket	100,00%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	45 Paket							
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan						15 Paket	15 Paket	100,00%

X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	28 Dokumen							
X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	28 Laporan							
X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						12 Laporan	12 Laporan	100,00%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan							
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						60 Laporan	60 Laporan	100,00%

X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	55 Unit					16 Unit	16 Unit	100,00%
X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit							
X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						0	0	
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit							

X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						0	0	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit							
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						10 Unit	10 Unit	100,00%
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit							
X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						10 Unit	10 Unit	100,00%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%					100%	100%	100,00%

X.XX.01.2.08.01	Peneyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42 Laporan							
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						14 Laporan	14 Laporan	100,00%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan							
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						48 Laporan	48 Laporan	100,00%
X.XX.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</i>	99 unit					93 Unit	93 Unit	100,00%

X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	52 Unit							
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						22 Unit	22 Unit	100,00%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit							
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	1 Unit	100,00%

X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24 Unit							
X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi						70 Unit	70 Unit	100,00%

Tabel T.2.1.A Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2024-2026 sampai dengan Tahun 2024

Tabel 2.1.A
Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2024-2026 sampai dengan Tahun 2024

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2024	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Program Penanggulangan Bencana	100%	100%		
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	33,33%	100%		

Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0,00%	100%		
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	33,33%	100%		
<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>	<i>#DIV/0!</i>	100%		
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	<i>#DIV/0!</i>	100%		
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	33,33%	100%		
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	33,33%	100%		
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	33,33%	100%		

Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	33,33%	100%		
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	33,33%	100%		
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	33,33%	100%		
Penyusunan Rencana Kontijensi	33,33%	100%		
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	33,33%	100%		
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	33,33%	100%		
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	33,33%	100%		
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<i>#DIV/0!</i>	100%		
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	33,33%	100%		

Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	33,33%	100%		
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3,33%	100%		
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	33,33%	100%		
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	33,33%	100%		
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	33,33%	100%		
Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	#DIV/0!	100%		
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	#DIV/0!	100%		
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	#DIV/0!	100%		

Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	33,33%	100%		
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	33,33%	100%		
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	33,33%	100%		
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	33,33%	100%		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	33,33%	100%		
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	33,33%	100%		

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	<i>#DIV/0!</i>	100%		
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	<i>#DIV/0!</i>	100%		
Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	<i>#DIV/0!</i>	100%		
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	<i>#DIV/0!</i>	100%		
Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	<i>#DIV/0!</i>	100%		
Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	<i>#DIV/0!</i>	100%		

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Adapun penjelasan dari jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah Kabupaten/Kota tersebut sebagai berikut :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana meliputi wilayah kabupaten/kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. pelayanan informasi rawan bencana, paling sedikit memuat penyusunan kajian risiko bencana dan komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana. Pelayanan Informasi Rawan Bencana meliputi :

- a. penyusunan kajian risiko bencana; dan
- b. Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana meliputi :

- a. penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. pembuatan rencana kontinjensi;
- c. pelatihan pencegahan dan mitigasi;

- d. gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
- e. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- f. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor dan kekeringan. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana meliputi :

- a. respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah *zoonosis* prioritas;
- b. respon cepat darurat bencana;
- c. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- d. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja strategis. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100	: Sangat Berhasil
70s/d 84	: Berasil
55 s/d 69	: Cukup Berhasil
< 55	: Tidak Berhasil

Pencapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan selama tahun 2023 rata-rata mencapai 101,50%. Hal ini dapat diartikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan selama tahun 2023 dikategorikan sangat berhasil. Capaian kinerja sebesar 101,50% tersebut merupakan keberhasilan instansi dalam program dan kegiatan selama tahun 2023.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN PASURUAN

Dari uraian tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Pasuruan di atas dapat disimpulkan bahwa BPBD, dalam hal ini Unsur Pelaksana BPBD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala BPBD sehari-hari memiliki peran yang cukup besar, yaitu fungsi koordinasi, komando dan pelaksana. Fungsi koordinasi diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana, berperan pada tahap pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Fungsi komando diperlukan ketika menghadapi keadaan tanggap darurat bencana. Fungsi sebagai pelaksana dilakukan oleh Unsur Pelaksana BPBD sendiri secara internal dan eksternal dalam upaya penanggulangan bencana pada semua tahapan.

Sedangkan isu-isu strategis yang terkait dengan penanggulangan bencana dan dalam upaya sinkronisasi Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2025, yang mana BPBD masuk pada Prioritas : Pengelolaan Kawasan Pariwisata AATP, adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2. Penguatan kapasitas kawasan;
3. Pembangunan Early Warning System.
4. Penanganan dan mengatasi bencana hidrometeorologi kekeringan dan banjir bandang
5. Penanggulangan Bencana kekeringan yang disebabkan oleh perubahan Iklim El Nino

Berdasarkan hasil analisa faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan BPBD Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama ini bilamana ditinjau dengan kondisi internal (Kekuatan / *Strengths* dan Kelemahan / *Weakness*) serta kondisi eksternal (Peluang / *Opportunity* dan Tantangan / *Threats*) dapat diperoleh sebagai berikut:

A. Faktor Lingkungan Internal Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Mudahnya akses koordinasi vertikal dengan BPBD provinsi dan BNPB pusat;
- 2) Adanya peraturan perundang-undangan tentang Organisasi dan

Tata Kerja BPBD serta peraturan perundang-undangan lain terkait kebencanaan;

- 3) Adanya dukungan dana yang cukup memadai setiap tahun untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan (BTT);
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan peralatan kerja;
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 6) Tersedianya gedung kantor dan gudang logistik BPBD;

B. Faktor Lingkungan Internal Kelemahan (Weakness)

- 1) Sumber daya aparatur yang ada saat ini belum memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai;
- 2) Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif dan lintas sektor (baru tersedia Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal pembentukan organisasi BPBD);
- 3) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi lintas sektoral dalam manajemen penanggulangan bencana;
- 4) Belum ditetapkan dan terinformasikannya peta rawan bencana untuk semua jenis bencana yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
- 5) Belum tercatat secara rutin dan berkala data-data kejadian bencana yang ada;
- 6) Belum terlaksana secara nyata SOP/Protap/SPM pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- 7) Belum optimalnya ketersediaan anggaran terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

Sesuai dengan Rancangan RPD tahun 2024-2026, permasalahan-permasalahan terkait kebencanaan di Kabupaten Pasuruan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Masih tingginya tingkat kejadian bencana di wilayah Kabupaten Pasuruan (banjir, tanah longsor, rawan air/kekeringan, angin putting beliung, kebakaran hutan dan lahan)
- 2) Belum optimalnya manajemen penanganan bencana serta kurangnya dukungan prasarana
- 3) Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana belum terlatih menghadapi bencana

- 4) Meluasnya bencana kekeringan yang diakibatkan adanya perubahan iklim

Sebagaimana permasalahan yang tertuang dalam rancangan RPD seperti diatas, maka dapat diuraikan permasalahan-permasalahan yang lebih rinci yang menjadi kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama ini, yaitu :

- 1) Terbatasnya sumber daya manusia yang ada pada Unsur Pelaksana BPBD baik dari segi kompetensi/kualitas dan kuantitas;
- 2) Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif dan lintas sektor (baru tersedia Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal pembentukan organisasi BPBD);
- 3) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi lintas sektoral dalam manajemen penanggulangan bencana;
- 4) Belum ditetapkan dan terinformasikannya peta rawan bencana untuk semua jenis bencana yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
- 5) Belum tercatat secara rutin dan berkala data-data kejadian bencana yang ada;
- 6) Belum terlaksana secara nyata SOP/Protap/SPM pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- 7) Belum optimalnya ketersediaan anggaran terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- 8) Adanya kesamaan waktu antara penanganan darurat bencana yang harus dituntaskan dengan cepat dan segera dengan kegiatan rutin yang telah ditetapkan jadwalnya;
- 9) Terbatasnya referensi program kerja/kegiatan penanggulangan bencana yang ada, baik di provinsi maupun di daerah lain untuk dipergunakan sebagai acuan;
- 10) Masih belum adanya kesepahaman tentang adanya paradigma baru penanggulangan bencana yang menitikberatkan pada pencegahan dan pengurangan risiko bencana pada sebagian besar masyarakat, termasuk lembaga pemerintah maupun non pemerintah serta lembaga usaha;
- 11) Masih terbatas dan belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia yang ada pada semua tahapan penanggulangan bencana (prabencana, tanggap darurat dan pascabencana), baik kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah/non pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, dan ormas/LSM terkait kebencanaan.

Keterkaitan dengan prioritas pembangunan tahun 2025 yaitu Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai peran dalam Upaya memberi Daya Ungkit dalam prioritas Pembangunan tahun 2025 yaitu berkaitan dengan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang menjadi Indikator tujuan BPBD. Upaya tersebut di dukung dengan Program Penanggulangan Bencana dengan didukung kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Keterkaitan dengan Proyek Strategis Pengelolaan Kawasan Pariwisata AATP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai peran dalam Upaya memberi Daya Ungkit dalam Proyek Strategis Pengelolaan Kawasan Pariwisata AATP. Upaya tersebut di dukung dengan Program Penanggulangan Bencana dengan didukung kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

RKPD merupakan penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional yang berfungsi untuk memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan

perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah. Selanjutnya RKPD menjadi acuan dalam proses penyusunan Renja dan RKA OPD serta menjadi dasar pedoman penyusunan KUA-PPAS dan R-APBD. Untuk sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah di bidang keuangan negara/pemerintah daerah dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, maka Kepala Daerah menyusun rancangan KUA-PPAS, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004. Pada proses perencanaan, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu menyusun PPAS yang merupakan tindak lanjut dari penyusunan kebijakan umum APBD dan rencana kerja pembangunan daerah. Dalam penyusunan rancangan awal Renja BPBD Tahun 2023 sudah diupayakan menyesuaikan dengan kondisi internal/ eksternal BPBD serta kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Pasuruan dan alokasi anggaran yang tersedia. Dimana usulan rencana kerja pada BPBD yang memuat serangkaian rencana program kerja/ kegiatan sudah sesuai tugas dan fungsi BPBD serta berpedoman pada RPJMD, Renstra Daerah, RKPD, Renstra OPD/ isu-isu/ program/Renstra dan Renja nasional yang terkait dengan penanggulangan bencana.

Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penanggulangan Bencana	Kab. Pasuruan	Outcome : Persentase Layanan Penanggulangan Bencana yang Berkualitas	<u>100%</u>	<u>5.205.303.274</u>	Program Penanggulangan Bencana	Kab. Pasuruan	Outcome : Persentase Layanan Penanggulangan Bencana yang Berkualitas	<u>100%</u>	<u>5.005.303.274</u>	Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana
	Kegiatan:		Output:			Kegiatan:		Output:			
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	3.320 Orang (83 giat)	925.138.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	83 giat	725.138.000	
	Sub Kegiatan:		Output:			Sub Kegiatan:		Output:			
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	-	0	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal								

	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	3.320 orang	725.138.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	3.320 orang	725.138.000	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan Sosialisasi, bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun								
	Kegiatan:		Output:			Kegiatan:		Output:			
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Pasuruan	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	1.980.165.274	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Pasuruan	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	1.980.165.274	
	Sub Kegiatan:		Output:			Sub Kegiatan:		Output:			
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 dok	100.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 dok	100.000.000	

	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal								
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	80 orang	130.344.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	80 orang	130.344.000	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana								
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 dok; 4 unit EWS; 1 Receiver; pendukung Pusdalops	945.182.735	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 dok; 4 unit EWS; 1 Receiver; pendukung Pusdalops	945.182.735	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya								

	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	122 unit	34.170.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	122 unit	34.170.000	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya								
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 dok	68.068.539	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 dok	68.068.539	
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani								
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4 kawasan	251.334.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4 kawasan	251.334.000	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana								

	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	40 orang	168.149.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	40 orang	168.149.000	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya								
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	-	-	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	-	-	
	Penyusunan Rencana Kontijensi		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi								
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	105500%	231.765.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	105500%	231.765.000	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan								
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	-	-	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	-	-	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi								

	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Pasuruan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	27 keluarga	51.152.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Pasuruan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	27 keluarga	51.152.000	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam								
	Kegiatan:		Output:			Kegiatan:		Output:			
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Pasuruan	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban yang dilaksanakan sesuai Ketentuan	100%	1.800.000.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Pasuruan	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban yang dilaksanakan sesuai Ketentuan	100%	1.800.000.000	
	Sub Kegiatan:		Output:			Sub Kegiatan:		Output:			
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit / Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 laporan	3.750.000	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit / Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 laporan	3.750.000	
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas								
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	15 dok	501.570.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	15 dok	501.570.000	

	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat								
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1000 orang	31.500.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Kab. Pasurua n	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1000 orang	31.50 0.000	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana								
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 orang	1.255.680.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasurua n	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 orang	1.255. 680.0 00	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 laporan	3.750.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Pasurua n	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 lapora n	3.750. 000	

	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota								
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi / Wabah Penyakit	Kab. Pasuruan	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 dok	3.750.000	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi / Wabah Penyakit	Kab. Pasuruan	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 dok	3.750.000	
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu								
	Kegiatan:		Output:			Kegiatan:		Output:			
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	9 laporan	500.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	9 laporan	500.000.000	
	Sub Kegiatan:		Output:			Sub Kegiatan:		Output:			
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 dok	75.000.000	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 dok	75.000.000	

	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah								
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 dok	60.000.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 dok	60.000.000	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dok	40.000.000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dok	40.000.000	
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 dok	70.000.000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 dok	70.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 laporan	100.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 laporan	100.000.000	
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	4 dok	155.000.000	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	4 dok	155.000.000	
			Nilai SAKIP	A (81,00)		Nilai SAKIP	A (81,00)				

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Pasuruan	Outcome : Persentase Dokumen/Laporan Administrasi PD yang Baik atau Sesuai Regulasi	100%	5.873.286.622	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Pasuruan	Outcome : Persentase Dokumen/Laporan Administrasi PD yang Baik atau Sesuai Regulasi	100%	9.285.706.622	Untuk pemenuhan kebutuhan SDM (pegawai/pejabat) dengan komposisi jabatan pada SOTK baru, pemenuhan sarana dan prasarana serta operasional Gedung Baru BPBD
	Kegiatan :		Output :			Kegiatan :		Output :			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1 dok	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1 dok	50.000.000	
	Sub Kegiatan:		Output:			Sub Kegiatan:		Output:			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	50.000.000	
	Kegiatan :		Output :			Kegiatan :		Output :			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	2.926.620.387	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	2.926.620.387	
	Sub Kegiatan:		Output:			Sub Kegiatan:		Output:			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	216 orang-bulan	2.500.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 orang-bulan	2.500.000.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 dok	350.000.387	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	350.000.387	

			ASN								
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	76.620.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	76.620.000	
	Kegiatan :		Output :			Kegiatan :		Output :			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	100%	155.485.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	100%	165.485.000	
	Sub Kegiatan:		Output:			Sub Kegiatan:		Output:			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60 paket	65.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60 paket	65.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasuruan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 orang	90.485.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasuruan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 orang	100.485.000	
	Kegiatan :		Output :			Kegiatan :		Output :			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	602.886.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	450.306.000	
	Sub Kegiatan:		Output:			Sub Kegiatan:		Output:			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 paket	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 paket	25.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46 paket	145.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46 paket	18.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	75 paket	35.000.000	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 paket	12.306.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 paket	12.306.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dok	35.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dok	80.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	80.580.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	80.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	200.000.000	
	Kegiatan :		Output :			Kegiatan :		Output :			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	12 unit	1.350.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	12 unit	4.900.000.000	
	Sub Kegiatan:		Output:			Sub Kegiatan:		Output:			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	900.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 unit	1.550.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit	3.000.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	250.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	250.000.000	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit	200.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit	100.000.000	
	Kegiatan :		Output :			Kegiatan :		Output :			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	206.855.830	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	46.855.830	
	Sub Kegiatan:		Output:			Sub Kegiatan:		Output:			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 laporan	6.746.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 laporan	4.746.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	200.109.830	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	42.109.830	
	Kegiatan :		Output :			Kegiatan :		Output :			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	93 unit	556.439.405	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	93 unit	746.439.405	
	Sub Kegiatan:		Output:			Sub Kegiatan:		Output:			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 unit	488.665.475	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 unit	488.665.475	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	37.773.930	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 unit	57.773.930	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	200.000.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam Musrenbang biasanya setiap OPD menerima dan menuangkannya usulan-usulan program kegiatan dari masyarakat yang disampaikan melalui beberapa tahap. Tahap awal melalui musrenbang tingkat desa dilanjutkan tingkat Kecamatan baru kemudian tingkat Kabupaten. Di tingkat OPD yang dilakukan adalah dengan melaksanakan forum OPD itu sendiri. Forum OPD ini bertujuan untuk merencanakan kegiatan tiap tahun yang disesuaikan dengan Renstra OPD itu sendiri, melalui musrenbang ditingkat Kabupaten para pemangku kebijakan yang terdiri atas pemegang kebijakan di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten juga para tokoh masyarakat dan organisasi melaksanakan musyawarah dalam menyelaraskan usulan-usulan program dan kegiatan masyarakat sehingga usulan tersebut tidak menyimpang dari renstra yang dimiliki OPD yang membidangi masing-masing kegiatan. Dengan musrenbang ini diharapkan sasaran, lokasi, kegiatan dan anggaran yang direncanakan akan seimbang dan tepat/efektif. Usulan untuk dilaksanakan pada tahun 2024 terdapat pada kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana).
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan sub kegiatan :
 - a. Pelatihan Dan Peningkatan Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana;
 - b. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 - c. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten kota;
 - e. Pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana (pelatihan bagi masyarakat / warga negara di desa/ kelurahan yg wilayahnya beresiko tinggi terhadap rawan bencana);
 - f. Pelatihan dan peningkatan kapasitas keluarga yang tanggap bencana (materi sesuai dengan kerawanan bencana banjir, kekeringan, tanah longsor, angin putting beliung)
3. Kegiatan Pelayanan dan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana dengan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana (terpal, sanbag, alat kebersihan, penyediaan kebutuhan dasar);
- 4. Kegiatan Penataan sistem dasar penganggulangan bencana dengan sub kegiatan :
 - a. Pengelolaan dan pemanfaatan sistim informasi kebencanaan;

Tabel T-C.32 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Tabel 2.4
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : BPBD Kabupaten Pasuruan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Diisikan usulan Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Adapun yang dimaksud telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi pemerintah daerah. Oleh karena itu kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) sedapat mungkin bahkan harus selaras, terpadu dan sinkron dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bahkan dengan kebijakan nasional (Pemerintah pusat).

Kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait termasuk Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai aturan teknis pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Sedangkan landasan idiil dan konstitusional penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 pada pasal 2 adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalam pasal 3 pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 disebutkan bahwa asas-asas pokok dalam penanggulangan bencana meliputi asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara prinsip-prinsip penanggulangan bencana mencakup:

- a) prinsip cepat dan tepat;
- b) prioritas;
- c) koordinasi dan keterpaduan;
- d) berdaya guna dan berhasil guna;
- e) transparansi dan akuntabilitas;
- f) kemitraan;
- g) pemberdayaan;
- h) non diskriminatif; dan
- i) non proletisi.

Selanjutnya dalam pasal 5 pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung

jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini sesuai ketentuan pasal 6 pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 meliputi :

- a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai/on call; dan
- f. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dampak bencana.

Adapun kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Presiden terpilih periode 2020-2024 sebagai tindak lanjut dari peraturan perundangan tentang penanggulangan bencana sesuai RPJMN Tahun 2020-2024 dan ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis BNPB Tahun 2020-2024 tercantum sebagaimana tabel 3.1 berikut dibawah ini:

MATRIKS PENJABARAN ARAH KEBIJAKAN KEDALAM SASARAN STRATEGIS
RENSTRA BNPB TAHUN 2020-2024

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020-2024	STRATEGI RPJMN 2020-2024	SASARAN STRATEGIS BNPB 2020-2024	OUTCOME
1.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, dilakukan dengan mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup.	Penguatan data, informasi, dan literasi bencana	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana.
		Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.	Rata-rata angka kematian akibat bencana saat keadaan darurat per 100.000 jiwa.
2.	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	Penguatan rencana pengurangan risiko bencana melalui rencana aksi secara nasional dan daerah yang diintegrasikan dengan rencana aksi adaptasi perubahan iklim;	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.	Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana.
3.	Pembangunan rendah karbon, dilakukan melalui upaya penurunan emisi dan intensitas emisi pada	Peningkatan sarana prasarana mitigasi dan penanggulangan bencana	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan	Indeks Reformasi Birokrasi.

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020- 2024	STRATEGI RPJMN 2020-2024	SASARAN STRATEGIS BNPB 2020-2024	OUTCOME
	bidang-bidang prioritas yakni meliputi bidang energi, lahan, limbah, Industri, dan kelautan.		transparan	
		Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi Penanggulangan Bencana		
		Penguatan penanganan darurat bencana		
		Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana		
		Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu, terutama melalui penguatan sistem peringatan dini INATEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System) dan MHEWS (Multi Hazard Early Warning System)		
		Penguatan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana melalui sosial re engineering ketahanan bencana multilevel terutama level keluarga, komunitas maupun desa		
		Peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana		

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Penanggulangan Bencana, BPBD selain berpijak dan bertitik tolak pada Pemerintah kabupaten Pasuruan juga memperhatikan kebijakan-kebijakan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu:

- 1) Kementerian Dalam Negeri;
- 2) BNPB; dan
- 3) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BPBD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Apabila mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, maka Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Tujuan **“Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana”** dengan indicator Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
- b. Sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana”** dengan empat indicator seperti dibawah :
 - 1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebesar 4,2 %
 - 2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebesar 6,1 %
 - 3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban sebesar 100%
 - 4) Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana sebesar 100%

Tabel 3.2.A Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tabel 3.2.A
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Target 2025
Indikator Tujuan	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		0,745	0,75
Indikator Sasaran	1. Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana yang Tersampaikan sesuai Ketentuan		0,42%	0,63%
	2. Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan		6,1%	9.15%
	3. Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban yang dilaksanakan sesuai Ketentuan		100%	100%

	4. Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun		100%	100%
	5. Nilai SAKIP		81,50	82,00
Indikator SPM	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal		100%	100%
	2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		100%	100%
	3. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal		100%	100%
	4. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal		100%	100%
	5. Persentase aparatur dan Warga Negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		100%	100%
	6. Persentase warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan terhadap bencana		100%	100%
	7. Persentase Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana		100%	100%
	8. Persentase Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan		100%	100%
	9. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB penyakit/wabah zoonosis prioritas		100%	100%
	10. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana		100%	100%
	11. Persentase jumlah petugas yang		100%	100%

	aktif dalam penanganan darurat bencana			
	12. Persentase jumlah korban yang berhasil dicari , ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana		100%	100%
Indikator Kinerja Kunci	1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		3.320 orang	3.320 orang
	2. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		2.070 orang	2.070 orang
	3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		1.000 orang	1.000 orang
Indikator Program	1. Persentase Layanan Penanggulangan Bencana yang Berkualitas		100%	100%
	2. Persentase Dokumen/Laporan Administrasi PD yang Baik atau Sesuai Regulasi		100%	100%

Tabel 3.2.B Sinkronisasi IKD dan IKU

Indikator Sasaran RPD			IKU			Program
Indikator	Formulasi	Target 2025	Indikator	Formulasi	Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Pengukuran IKD dengan berpedoman pada Juknis Perangkat Penilaian IKD (71 Indikator)	0,75	
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	(Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawab bencana / Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana) x 100%	0,42%	Program Penanggulangan Bencana
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	(Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana / Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana) x 100%	6,1%	Program Penanggulangan Bencana

			Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban	(Jumlah warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban / Jumlah korban bencana keseluruhan) x 100%	100%	Program Penanggulangan Bencana
			Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun	(Jumlah dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun / Jumlah dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang direncanakan) x 100%	6 dok	Program Penanggulangan Bencana
			Nilai SAKIP	Hasil pengukuran oleh Inspektorat	81,50	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA BPBD TAHUN 2024

Dalam tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026 yaitu **MENINGKATNYA PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH**, untuk mendukung RPD tersebut BPBD menetapkan Tujuan **“Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana”** dan sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana”** . Adapun titik berat Rencana Kerja Perangkat Daerah BPBD pada tahun 2024 adalah upaya-upaya yang dapat mendukung peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, yaitu dengan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan SDM aparatur Penanggulangan Bencana dan Masyarakat, peningkatan penguatan kapasitas masyarakat dan pelibatan peran serta masyarakat, lembaga usaha, kelompok rentan bencana dan elemen terkait lainnya mulai ormas, LSM, pemerhati kebencanaan, perguruan tinggi setempat, guru dan warga sekolah. Juga upaya pemenuhan kebutuhan standar minimal penanggulangan bencana, khususnya dalam hal pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Persentase Desa / Kelurahan yang Mendapatkan Sosialisasi Antisipasi Bencana di Kawasan Rawan Bencana, diawal Perjanjian Kinerja BPBD menentukan target sebesar 12,5% kemudian pada Perjanjian Kinerja Perubahan sebesar 28,75%, realisasi dan capaian kinerja diakhir tahun 2022 sebesar 100% dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 23. Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana, BPBD menentukan target 20% sebanyak 16 desa/kelurahan pada Perjanjian Kinerja, realisasi dan capaian kinerja diakhir tahun 2022 sebesar 112,5% sebanyak 18 desa/kelurahan. Persentase Korban Bencana Tertangani, BPBD menargetkan 100% pada Perjanjian Kinerja, realisasi dan capaian kinerja diakhir tahun 2022 sebesar 100% sebanyak 67.199 korban yang tertangani. Persentase Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Dampak Bencana, BPBD menargetkan 100% pada Perjanjian Kinerja, realisasi dan capaian kinerja diakhir tahun 2022 sebesar 100% sebanyak 394 unit. Pada tahun 2022 target nilai SAKIP sebesar 77,50 dan tercapai sebesar 80,63. Capaian melebihi target sehingga persentase capaian sebesar 104,04%.

3.3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Program, kegiatan dan sub kegiatan Prioritas pada Renja BPBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I	Program Penanggulangan Bencana		
1		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
			Penyusunan Rencana Kontijensi
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
3		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit / Wabah Zoonosis Prioritas
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
			Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi / Wabah Penyakit
4		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
			Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 6.1 Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD

BPBD mempunyai 2 Program yang terdiri dari Program utama yang mempunyai 4 kegiatan yang terbagi dalam 25 sub kegiatan dan Program Penunjang yang terdiri dari 7 Kegiatan yang terbagi kedalam 22 sub kegiatan. Berdasarkan Pemetaan kebutuhan anggaran tahun 2025 BPBD membutuhkan anggaran sebesar Rp. 14,291,009,896 (empat belas milyar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terinci pada program dan kegiatan seperti dibawah ini :

1. Program Penanggulangan Bencana Rp. 5,005,303,274, BPBD sebagai salah satu pengampu SPM Sub Urusan Bencana sehingga berkewajiban dalam pemenuhan SPM, yang terbagi pada empat kegiatan :

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Rp. 725,138,000
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Rp. 1,980,165,274
 - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Rp.1,800,000,000
 - d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Rp. 500,000,000
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 9,285,706,622, digunakan untuk pemenuhan kebutuhan SDM (pegawai/pejabat) dengan komposisi jabatan pada SOTK baru, pemenuhan sarana dan prasarana serta operasional Gedung Baru BPBD, yang terbagi pada tujuh kegiatan :
- a. Belanja Pegawai Rp. 2,926,620,387
 - b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 4,900,000,000
 - c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 746,439,405
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 450,306,000
 - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 165,485,000
 - f. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 50,000,000
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 46,855,830

3.3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah Tahun 2025

Tabel 3.3

IKU	Tema 2025	Prioritas Pembangunan		Subkegiatan	Kegiatan	Program	Proyek Strategis
		Prioritas Pembangunan	Sub Prioritas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Peningkatan kualitas SDM dan daya saing daerah untuk mendukung transformasi ekonomi inklusif	Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal	Ketahanan daerah	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Program Penanggulangan Bencana	Pengelolaan Kawasan Pariwisata AATP
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			

				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			
--	--	--	--	--	--	--	--

3.3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Proyek Strategis (jika ada)

Tabel 3.4 Matrik Perencanaan Pembangunan Tahunan pada RKPD Tahun 2024-2026

No	Uraian Proyek Strategis	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target Indikator Subkegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Sumber dana (DAU/ DAK/ DBHBHT/ ... disebutkan)	Lokasi sasaran			Ket
										titik koordinat (Sistim Geografis dalam satuan derajat menit detik) **)	Desa/ Kelurahan	Kec	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pengelolaan Kawasan Pariwisata AATP	BPBD	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota									
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	80 orang	130.344.000	DAU				

					Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 dok; 4 unit EWS; 1 Receiver; pendukung Pusdalops	945.182.735	DAU				
					Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	122 unit	34.170.000	DAU				
					Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4 kawasan	251.334.000	DAU				

3.3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Inovasi Perangkat Daerah

Tabel 3.5 Program Pendukung Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
Indibiduan	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	105.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan didasarkan pada tujuan Rencana Pembangunan Daerah yaitu **“MENINGKATNYA PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH”**. Rencana kerja BPBD tahun 2024 mencakup 2 program, 11 kegiatan dan 47 sub kegiatan yaitu seperti pada table dibawah ini :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I	Program Penanggulangan Bencana		
1		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
			Penyusunan Rencana Kontijensi
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
3		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit / Wabah Zoonosis Prioritas
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
			Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik / Wabah Penyakit

4		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
			Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 5

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)	(10)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi		100%			5,873,286,622			100%	4,114,094,894
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi		100%			Rp 75,000,000			100%	Rp 50,000,000

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pasu ruan	1 Doku men				Rp 75,000,000	DAU		1 Dokume n	Rp 50,000,000
						Belanja operasi	:		Rp 75,000,000				
						Belanja pegawai	:		Rp -				
						Belanja barang dan jasa	:		Rp 75,000,000				
						Belanja bunga	:		Rp -				
						Belanja subsidi	:		Rp -				
						Belanja hibah	:		Rp -				
						Belanja bantuan sosial	:		Rp -				
						Belanja modal	:		Rp -				
						Belanja tidak terduga	:		Rp -				
						Belanja transfer	:		Rp				

								-				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan		100%			Rp 2,776,620,387			100%	Rp 2,798,739,064
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	216 Orang - Bulan			Rp 2,500,000,000	DAU		216 Orang - Bulan	Rp 2,500,787,000
						Belanja operasi	:	Rp 2,500,000,000				
						Belanja pegawai	:	Rp 2,500,000,000				
						Belanja barang dan jasa	:	Rp -				
						Belanja bunga	:	Rp -				
						Belanja subsidi	:	Rp -				
						Belanja hibah	:	Rp -				

						Belanja bantuan sosial	:	Rp -					
						Belanja modal	:	Rp -					
						Belanja tidak terduga	:	Rp -					
						Belanja transfer	:	Rp -					
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasuruan	12 Dokumen			Rp 200,000,387	DAU		12 Dokumen	Rp 217,500,406	
						Belanja operasi	:	Rp 200,000,387					
						Belanja pegawai	:	Rp -					
						Belanja barang dan jasa	:	Rp 200,000,387					
						Belanja bunga	:	Rp -					
						Belanja subsidi	:	Rp -					

							Belanja hibah	:	Rp -				
							Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
							<i>Belanja modal</i>	:	<i>Rp -</i>				
							<i>Belanja tidak terduga</i>	:	<i>Rp -</i>				
							<i>Belanja transfer</i>	:	<i>Rp -</i>				
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Kab. Pasuruan</i>	<i>12 Dokumen</i>				Rp 76,620,000	<i>DAU</i>		<i>12 Dokumen</i>	Rp 80,451,658
							<i>Belanja operasi</i>	:	<i>Rp 76,620,000</i>				
							Belanja pegawai	:	Rp -				
							Belanja barang dan jasa	:	Rp 76,620,000				
							Belanja bunga	:	Rp -				
							Belanja subsidi	:	Rp -				

							Belanja hibah	:	Rp -				
							Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
							<i>Belanja modal</i>	:	<i>Rp -</i>				
							<i>Belanja tidak terduga</i>	:	<i>Rp -</i>				
							<i>Belanja transfer</i>	:	<i>Rp -</i>				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan		100%				Rp 155,485,000			100%	Rp 50,000,000
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Kab. Pasuruan</i>	<i>60 Paket</i>				Rp 65,000,000	<i>DAU</i>		-	<i>Rp -</i>
							<i>Belanja operasi</i>	:	<i>Rp 65,000,000</i>				
							Belanja pegawai	:	Rp -				

						Belanja barang dan jasa	:	Rp 65,000,000				
						Belanja bunga	:	Rp -				
						Belanja subsidi	:	Rp -				
						Belanja hibah	:	Rp -				
						Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
						<i>Belanja modal</i>	:	<i>Rp -</i>				
						<i>Belanja tidak terduga</i>	:	<i>Rp -</i>				
						<i>Belanja transfer</i>	:	<i>Rp -</i>				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	<i>Kab. Pasuruan</i>	<i>31 Orang</i>			Rp 90,485,000	<i>DAU</i>		<i>15 Orang</i>	Rp 50,000,000
						<i>Belanja operasi</i>	:	<i>Rp 90,485,000</i>				

							Belanja pegawai	:	Rp -				
							Belanja barang dan jasa	:	Rp 90,485,000				
							Belanja bunga	:	Rp -				
							Belanja subsidi	:	Rp -				
							Belanja hibah	:	Rp -				
							Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
							<i>Belanja modal</i>	:	<i>Rp -</i>				
							<i>Belanja tidak terduga</i>	:	<i>Rp -</i>				
							<i>Belanja transfer</i>	:	<i>Rp -</i>				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD		100%					Rp 602,886,000			100%	Rp 418,500,000

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasu ruan	15 Paket				Rp 30,000,000	DAU		15 Paket	Rp 31,500,000
						Belanja operasi	:		Rp 30,000,000				
						Belanja pegawai	:		Rp -				
						Belanja barang dan jasa	:		Rp 30,000,000				
						Belanja bunga	:		Rp -				
						Belanja subsidi	:		Rp -				
						Belanja hibah	:		Rp -				
						Belanja bantuan sosial	:		Rp -				
						Belanja modal	:		Rp -				
						Belanja tidak terduga	:		Rp -				
						Belanja transfer	:		Rp -				

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	46 Paket				Rp 145,000,000	DAU		30 Paket	Rp 100,000,000
						Belanja operasi	:	Rp 145,000,000					
						Belanja pegawai	:	Rp -					
						Belanja barang dan jasa	:	Rp 145,000,000					
						Belanja bunga	:	Rp -					
						Belanja subsidi	:	Rp -					
						Belanja hibah	:	Rp -					
						Belanja bantuan sosial	:	Rp -					
						Belanja modal	:	Rp -					
						Belanja tidak terduga	:	Rp -					
						Belanja transfer	:	Rp					

								-				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Pasu ruan	50 Paket			Rp 50,000,000	DAU		50 Paket	Rp 50,000,000
						Belanja operasi	:	Rp 50,000,000				
						Belanja pegawai	:	Rp -				
						Belanja barang dan jasa	:	Rp 50,000,000				
						Belanja bunga	:	Rp -				
						Belanja subsidi	:	Rp -				
						Belanja hibah	:	Rp -				
						Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
						Belanja modal	:	Rp -				
						Belanja tidak	:	Rp				

							<i>terduga</i>		-				
							<i>Belanja transfer</i>	:	Rp				
									-				
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	<i>Kab. Pasu ruan</i>	<i>15 Paket</i>				Rp 12,306,000	<i>DAU</i>		<i>15 Paket</i>	Rp 10,000,000
							<i>Belanja operasi</i>	:	Rp 12,306,000				
							Belanja pegawai	:	Rp -				
							Belanja barang dan jasa	:	Rp 12,306,000				
							Belanja bunga	:	Rp -				
							Belanja subsidi	:	Rp -				
							Belanja hibah	:	Rp -				

						Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
						Belanja modal	:	Rp -				
						Belanja tidak terduga	:	Rp -				
						Belanja transfer	:	Rp -				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pasuruan	12 Dokumen			Rp 35,000,000	DAU		8 Dokumen	Rp 20,000,000
						Belanja operasi	:	Rp 35,000,000				
						Belanja pegawai	:	Rp -				
						Belanja barang dan jasa	:	Rp 35,000,000				
						Belanja bunga	:	Rp -				

						Belanja subsidi	:	Rp -				
						Belanja hibah	:	Rp -				
						Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
						Belanja modal	:	Rp -				
						Belanja tidak terduga	:	Rp -				
						Belanja transfer	:	Rp -				
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	12 Laporan			Rp 80,580,000	DAU		8 Dokumen	Rp 50,000,000
						Belanja operasi	:	Rp 80,580,000				
						Belanja pegawai	:	Rp -				

						Belanja barang dan jasa	:	Rp 80,580,000				
						Belanja bunga	:	Rp -				
						Belanja subsidi	:	Rp -				
						Belanja hibah	:	Rp -				
						Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
						Belanja modal	:	Rp -				
						Belanja tidak terduga	:	Rp -				
						Belanja transfer	:	Rp -				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	60 Laporan			Rp 250,000,000	DAU		40 Laporan	Rp 157,000,000
						Belanja operasi	:	Rp 250,000,000				

							Belanja pegawai	:	Rp -				
							Belanja barang dan jasa	:	Rp 250,000,000				
							Belanja bunga	:	Rp -				
							Belanja subsidi	:	Rp -				
							Belanja hibah	:	Rp -				
							Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
							<i>Belanja modal</i>	:	<i>Rp -</i>				
							<i>Belanja tidak terduga</i>	:	<i>Rp -</i>				
							<i>Belanja transfer</i>	:	<i>Rp -</i>				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi		100%					Rp 1,350,000,000			100%	90,000,000

		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Pasuruan	2 Unit				Rp 900,000,000	DAU		-	Rp -
						Belanja operasi	:		Rp -				
						Belanja pegawai	:		Rp -				
						Belanja barang dan jasa	:		Rp -				
						Belanja bunga	:		Rp -				
						Belanja subsidi	:		Rp -				
						Belanja hibah	:		Rp -				
						Belanja bantuan sosial	:		Rp -				
						Belanja modal	:		Rp 900,000,000				
						Belanja tidak	:		Rp				

							<i>terduga</i>		-				
							<i>Belanja transfer</i>	:	Rp				
									-				
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	<i>Kab. Pasu ruan</i>	<i>0 Unit</i>				Rp	<i>DAU</i>		<i>0 Unit</i>	<i>Rp</i>
									-				-
							<i>Belanja operasi</i>	:	Rp				
									-				
							Belanja pegawai	:	Rp				
									-				
							Belanja barang dan jasa	:	Rp				
									-				
							Belanja bunga	:	Rp				
									-				
							Belanja subsidi	:	Rp				
									-				
							Belanja hibah	:	Rp				
									-				

						Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
						Belanja modal	:	Rp -				
						Belanja tidak terduga	:	Rp -				
						Belanja transfer	:	Rp -				
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Pasuruan	10 Unit			Rp 250,000,000	DAU		2 Unit	Rp 50,000,000
						Belanja operasi	:	Rp -				
						Belanja pegawai	:	Rp -				
						Belanja barang dan jasa	:	Rp -				
						Belanja bunga	:	Rp -				
						Belanja subsidi	:	Rp -				

						Belanja hibah	:	Rp -				
						Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
						Belanja modal	:	Rp 250,000,000				
						Belanja tidak terduga	:	Rp -				
						Belanja transfer	:	Rp -				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasuruan	10 Unit			Rp 200,000,000	DAU		2 Unit	Rp 40,000,000
						Belanja operasi	:	Rp -				
						Belanja pegawai	:	Rp -				
						Belanja barang dan jasa	:	Rp -				
						Belanja bunga	:	Rp -				

							Belanja subsidi	:	Rp -				
							Belanja hibah	:	Rp -				
							Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
							Belanja modal	:	Rp 200,000,000				
							Belanja tidak terduga	:	Rp -				
							Belanja transfer	:	Rp -				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%				Rp 206,855,830			100%	206,855,830
		Peneyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasuruan	14 Laporan				Rp 6,746,000	DAU		14 Laporan	Rp 6,746,000
							Belanja operasi	:	Rp 6,746,000				

							Belanja pegawai	:	Rp -				
							Belanja barang dan jasa	:	Rp 6,746,000				
							Belanja bunga	:	Rp -				
							Belanja subsidi	:	Rp -				
							Belanja hibah	:	Rp -				
							Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
							Belanja modal	:	Rp -				
							Belanja tidak terduga	:	Rp -				
							Belanja transfer	:	Rp -				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pasuruan	48 Laporan				Rp 200,109,830	DAU		48 Laporan	Rp 200,109,830

						<i>Belanja operasi</i>	:	<i>Rp</i> <i>200,109,830</i>				
						Belanja pegawai	:	Rp -				
						Belanja barang dan jasa	:	Rp 200,109,830				
						Belanja bunga	:	Rp -				
						Belanja subsidi	:	Rp -				
						Belanja hibah	:	Rp -				
						Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
						<i>Belanja modal</i>	:	<i>Rp</i> -				
						<i>Belanja tidak terduga</i>	:	<i>Rp</i> -				
						<i>Belanja transfer</i>	:	<i>Rp</i> -				

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara		93 Unit				Rp 706,439,405			93 Unit	500,000,000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pasuruan	22 Unit				Rp 488,665,475	DAU		15 Unit	Rp 300,000,000
						Belanja operasi	:		Rp 488,665,475				
						Belanja pegawai	:		Rp -				
						Belanja barang dan jasa	:		Rp 488,665,475				
						Belanja bunga	:		Rp -				
						Belanja subsidi	:		Rp -				
						Belanja hibah	:		Rp -				

						Belanja bantuan sosial	:	Rp -					
						Belanja modal	:	Rp -					
						Belanja tidak terduga	:	Rp -					
						Belanja transfer	:	Rp -					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pasuruan	10 Unit			Rp 187,773,930	DAU		7 Unit	Rp 170,000,000	
						Belanja operasi	:	Rp 187,773,930					
						Belanja pegawai	:	Rp -					
						Belanja barang dan jasa	:	Rp 187,773,930					
						Belanja bunga	:	Rp -					
						Belanja subsidi	:	Rp -					

							Belanja hibah	:	Rp -				
							Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
							Belanja modal	:	Rp -				
							Belanja tidak terduga	:	Rp -				
							Belanja transfer	:	Rp -				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Pasuruan	1 Unit				Rp 30,000,000	DAU		48 Laporan	Rp 30,000,000
							Belanja operasi	:	Rp 30,000,000				
							Belanja pegawai	:	Rp -				
							Belanja barang dan jasa	:	Rp 30,000,000				
							Belanja bunga	:	Rp -				

							Belanja subsidi	:	Rp -				
							Belanja hibah	:	Rp -				
							Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
							<i>Belanja modal</i>	:	<i>Rp -</i>				
							<i>Belanja tidak terduga</i>	:	<i>Rp -</i>				
							<i>Belanja transfer</i>	:	<i>Rp -</i>				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat													
Program Penanggulangan Bencana			Persentase Layanan dan Regulasi Penanggulangan Bencana		100%				5,005,303,274			100%	5,655,568,438

	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Rawan Bencana yang Tersampaikan	Kab. Pasuruan	83 Giat				725,138,000	DAU		83 Giat	817,185,500
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Kab. Pasuruan	0				Rp -	DAU		0	-
						Belanja operasi	:	Rp -				
						Belanja pegawai	:	Rp -				
						Belanja barang dan jasa	:	Rp -				
						Belanja bunga	:	Rp -				
						Belanja subsidi	:	Rp -				
						Belanja hibah	:	Rp -				

							Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
							Belanja modal	:	Rp -				
							Belanja tidak terduga	:	Rp -				
							Belanja transfer	:	Rp -				
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Kab. Pasuruan	3.320 Orang				Rp 725,138,000	DAU		3.320 Orang	Rp 817,185,500
							Belanja operasi	:	Rp 506,438,000				
							Belanja pegawai	:	Rp -				
							Belanja barang dan jasa	:	Rp 506,438,000				
							Belanja bunga	:	Rp -				

							Belanja subsidi	:	Rp -				
							Belanja hibah	:	Rp -				
							Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
							<i>Belanja modal</i>	:	<i>Rp 218,700,000</i>				
							<i>Belanja tidak terduga</i>	:	<i>Rp -</i>				
							<i>Belanja transfer</i>	:	<i>Rp -</i>				
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Kab. Pasuruan	100%				1,980,165,274	DAU		100%	2,088,382,938
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Kab. Pasuruan	0 Dokumen				Rp -	DAU		1 Dokumen	100,000,000
							<i>Belanja operasi</i>	:	<i>Rp -</i>				
							Belanja pegawai	:	Rp -				

							Belanja barang dan jasa	:	Rp -				
							Belanja bunga	:	Rp -				
							Belanja subsidi	:	Rp -				
							Belanja hibah	:	Rp -				
							Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
							<i>Belanja modal</i>	:	<i>Rp -</i>				
							<i>Belanja tidak terduga</i>	:	<i>Rp -</i>				
							<i>Belanja transfer</i>	:	<i>Rp -</i>				
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	<i>Kab. Pasuruan</i>	<i>80 Orang</i>				Rp 130,344,000	<i>DAU</i>		<i>80 Orang</i>	<i>130,344,000</i>
							<i>Belanja operasi</i>	:	<i>Rp 130,344,000</i>				
							Belanja pegawai	:	Rp -				

							Belanja barang dan jasa	:	Rp 130,344,000				
							Belanja bunga	:	Rp -				
							Belanja subsidi	:	Rp -				
							Belanja hibah	:	Rp -				
							Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
							<i>Belanja modal</i>	:	<i>Rp -</i>				
							<i>Belanja tidak terduga</i>	:	<i>Rp -</i>				
							<i>Belanja transfer</i>	:	<i>Rp -</i>				
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	<i>Kab. Pasuruan</i>	<i>1 Dokumen (12 dok; 4 unit EWS; 1 Receiver; pendu</i>				Rp 945,182,735	<i>DAU</i>		<i>1 Dokumen (12 dok; 4 unit EWS; 1 Receiver; pendukung PUSDALO</i>	<i>548,325,000</i>

					<i>kung Pusda lops)</i>							<i>ps)</i>	
						<i>Belanja operasi</i>	:	<i>Rp 62,028,000</i>					
						Belanja pegawai	:	Rp -					
						Belanja barang dan jasa	:	Rp 62,028,000					
						Belanja bunga	:	Rp -					
						Belanja subsidi	:	Rp -					
						Belanja hibah	:	Rp -					
						Belanja bantuan sosial	:	Rp -					

							Belanja modal	:	Rp 883,154,735				
							Belanja tidak terduga	:	Rp -				
							Belanja transfer	:	Rp -				
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Kab. Pasuruan	122 Unit				Rp 34,170,000	DAU		252 Unit	Rp 70,890,000
							Belanja operasi	:	Rp 34,170,000				
							Belanja pegawai	:	Rp -				
							Belanja barang dan jasa	:	Rp 34,170,000				
							Belanja bunga	:	Rp -				
							Belanja subsidi	:	Rp -				
							Belanja hibah	:	Rp -				

							Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
							Belanja modal	:	Rp -				
							Belanja tidak terduga	:	Rp -				
							Belanja transfer	:	Rp -				
		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Kab. Pasuruan	1 Dokumen				Rp 68,068,539	DAU		1 Dokumen	Rp 75,661,938
							Belanja operasi	:	Rp 68,068,539				
							Belanja pegawai	:	Rp -				
							Belanja barang dan jasa	:	Rp 68,068,539				
							Belanja bunga	:	Rp -				
							Belanja subsidi	:	Rp -				

						Belanja hibah	:	Rp -				
						Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
						Belanja modal	:	Rp -				
						Belanja tidak terduga	:	Rp -				
						Belanja transfer	:	Rp -				
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Pasuruan	4 Kawasan			Rp 251,334,000	DAU		5 Kawasan	Rp 354,192,000
						Belanja operasi	:	Rp 242,586,000				
						Belanja pegawai	:	Rp -				
						Belanja barang dan jasa	:	Rp 242,586,000				
						Belanja bunga	:	Rp -				
						Belanja subsidi	:	Rp -				

							Belanja hibah	:	Rp -				
							Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
							Belanja modal	:	Rp 8,748,000				
							Belanja tidak terduga	:	Rp -				
							Belanja transfer	:	Rp -				
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kab. Pasuruan	40 Orang				Rp 168,149,000	DAU		40 Orang	211,899,000
							Belanja operasi	:	Rp 168,149,000				
							Belanja pegawai	:	Rp -				
							Belanja barang dan jasa	:	Rp 168,149,000				
							Belanja bunga	:	Rp -				
							Belanja subsidi	:	Rp -				

							Belanja hibah	:	Rp -				
							Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
							<i>Belanja modal</i>	:	<i>Rp -</i>				
							<i>Belanja tidak terduga</i>	:	<i>Rp -</i>				
							<i>Belanja transfer</i>	:	<i>Rp -</i>				
		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	<i>Kab. Pasuruan</i>	<i>0</i>				Rp -	<i>DAU</i>		<i>1 Dokumen</i>	<i>Rp 232,972,000</i>
							<i>Belanja operasi</i>	:	<i>Rp -</i>				
							Belanja pegawai	:	Rp -				
							Belanja barang dan jasa	:	Rp -				
							Belanja bunga	:	Rp -				
							Belanja subsidi	:	Rp -				

							Belanja hibah	:	Rp -				
							Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
							<i>Belanja modal</i>	:	<i>Rp -</i>				
							<i>Belanja tidak terduga</i>	:	<i>Rp -</i>				
							<i>Belanja transfer</i>	:	<i>Rp -</i>				
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	<i>Kab. Pasuruan</i>	<i>1055 Orang</i>				Rp 231,765,000	<i>DAU</i>		<i>1290 Orang</i>	<i>Rp 261,795,000</i>
							<i>Belanja operasi</i>	:	<i>Rp 231,765,000</i>				
							Belanja pegawai	:	Rp -				
							Belanja barang dan jasa	:	Rp 231,765,000				
							Belanja bunga	:	Rp -				
							Belanja subsidi	:	Rp -				

						Belanja hibah	:	Rp -				
						Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
						<i>Belanja modal</i>	:	<i>Rp -</i>				
						<i>Belanja tidak terduga</i>	:	<i>Rp -</i>				
						<i>Belanja transfer</i>	:	<i>Rp -</i>				
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	<i>Kab. Pasuruan</i>	<i>1 Dokumen</i>			Rp 100,000,000	<i>DAU</i>		<i>0</i>	-
						<i>Belanja operasi</i>	:	<i>Rp 100,000,000</i>				
						Belanja pegawai	:	Rp -				
						Belanja barang dan jasa	:	Rp 100,000,000				
						Belanja bunga	:	Rp -				
						Belanja subsidi	:	Rp -				

						Belanja hibah	:	Rp -				
						Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
						Belanja modal	:	Rp -				
						Belanja tidak terduga	:	Rp -				
						Belanja transfer	:	Rp -				
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Pasuruan	27 Keluarga			Rp 51,152,000	DAU		53 Keluarga	Rp 102,304,000
						Belanja operasi	:	Rp 51,152,000				
						Belanja pegawai	:	Rp -				
						Belanja barang dan jasa	:	Rp 51,152,000				
						Belanja bunga	:	Rp -				
						Belanja subsidi	:	Rp -				

							Belanja hibah	:	Rp -				
							Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
							Belanja modal	:	Rp -				
							Belanja tidak terduga	:	Rp -				
							Belanja transfer	:	Rp -				
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Bantuan Sosial serta Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Kab. Pasuruan	100%				Rp 1,800,000,000	DAU		100%	Rp 2,000,000,000
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Kab. Pasuruan	1 Laporan				Rp 3,750,000	DAU		1 Laporan	Rp 3,750,000
							Belanja operasi	:	Rp 3,750,000				
							Belanja pegawai	:	Rp -				
							Belanja barang dan jasa	:	Rp 3,750,000				
							Belanja bunga	:	Rp -				

							Belanja subsidi	:	Rp -				
							Belanja hibah	:	Rp -				
							Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
							Belanja modal	:	Rp -				
							Belanja tidak terduga	:	Rp -				
							Belanja transfer	:	Rp -				
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kab. Pasuruan	15 Dokumen				Rp 501,570,000	DAU		15 Dokumen	636,370,000
							Belanja operasi	:	Rp 479,070,000				
							Belanja pegawai	:	Rp -				
							Belanja barang dan jasa	:	Rp 479,070,000				

						Belanja bunga	:	Rp -				
						Belanja subsidi	:	Rp -				
						Belanja hibah	:	Rp -				
						Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
						Belanja modal	:	Rp 22,500,000				
						Belanja tidak terduga	:	Rp -				
						Belanja transfer	:	Rp -				
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kab. Pasuruan	1000 Orang			Rp 31,500,000	DAU		1000 Orang	31,500,000
						Belanja operasi	:	Rp 31,500,000				
						Belanja pegawai	:	Rp -				

							Belanja barang dan jasa	:	Rp 31,500,000				
							Belanja bunga	:	Rp -				
							Belanja subsidi	:	Rp -				
							Belanja hibah	:	Rp -				
							Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
							<i>Belanja modal</i>	:	<i>Rp -</i>				
							<i>Belanja tidak terduga</i>	:	<i>Rp -</i>				
							<i>Belanja transfer</i>	:	<i>Rp -</i>				
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<i>Kab. Pasuruan</i>	<i>200 Orang</i>				Rp 1,255,680,000	<i>DAU</i>		<i>300 Orang</i>	Rp 1,320,880,000
							<i>Belanja operasi</i>	:	<i>Rp 1,235,680,000</i>				
							Belanja pegawai	:	Rp -				

							Belanja barang dan jasa	:	Rp 1,235,680,000				
							Belanja bunga	:	Rp -				
							Belanja subsidi	:	Rp -				
							Belanja hibah	:	Rp -				
							Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
							<i>Belanja modal</i>	:	Rp 20,000,000				
							<i>Belanja tidak terduga</i>	:	Rp -				
							<i>Belanja transfer</i>	:	Rp -				
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Pasuruan	1 Laporan				Rp 3,750,000	DAU		1 Laporan	3,750,000
							<i>Belanja operasi</i>	:	Rp 3,750,000				
							Belanja pegawai	:	Rp -				

						Belanja barang dan jasa	:	Rp 3,750,000				
						Belanja bunga	:	Rp -				
						Belanja subsidi	:	Rp -				
						Belanja hibah	:	Rp -				
						Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
						Belanja modal	:	Rp -				
						Belanja tidak terduga	:	Rp -				
						Belanja transfer	:	Rp -				
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Kab. Pasuruan	1 Dokumen			Rp 3,750,000	DAU		1 Dokumen	3,750,000
						Belanja operasi	:	Rp 3,750,000				
						Belanja pegawai	:	Rp -				

							Belanja barang dan jasa	:	Rp 3,750,000				
							Belanja bunga	:	Rp -				
							Belanja subsidi	:	Rp -				
							Belanja hibah	:	Rp -				
							Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
							<i>Belanja modal</i>	:	<i>Rp -</i>				
							<i>Belanja tidak terduga</i>	:	<i>Rp -</i>				
							<i>Belanja transfer</i>	:	<i>Rp -</i>				
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Pasuruan	9 Laporan				500,000,000	DAU		9 Laporan	Rp 750,000,000

		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Kab. Pasu ruan	1 Doku men				Rp 75,000,000	DAU		1 Dokume n	Rp 112,500,000
						Belanja operasi	:		Rp 75,000,000				
						Belanja pegawai	:		Rp -				
						Belanja barang dan jasa	:		Rp 75,000,000				
						Belanja bunga	:		Rp -				
						Belanja subsidi	:		Rp -				
						Belanja hibah	:		Rp -				
						Belanja bantuan sosial	:		Rp -				
						Belanja modal	:		Rp -				
						Belanja tidak terduga	:		Rp -				
						Belanja transfer	:		Rp -				

		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Kab. Pasuruan	1 Dokumen				Rp 60,000,000	DAU		1 Dokumen	Rp 90,000,000
						Belanja operasi	:	Rp 60,000,000					
						Belanja pegawai	:	Rp -					
						Belanja barang dan jasa	:	Rp 60,000,000					
						Belanja bunga	:	Rp -					
						Belanja subsidi	:	Rp -					
						Belanja hibah	:	Rp -					
						Belanja bantuan sosial	:	Rp -					
						Belanja modal	:	Rp -					
						Belanja tidak terduga	:	Rp -					
						Belanja transfer	:	Rp -					

		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kab. Pasuruan	1 Dokumen				Rp 40,000,000	DAU		1 Dokumen	Rp 60,000,000
						Belanja operasi	:	Rp 40,000,000					
						Belanja pegawai	:	Rp -					
						Belanja barang dan jasa	:	Rp 40,000,000					
						Belanja bunga	:	Rp -					
						Belanja subsidi	:	Rp -					
						Belanja hibah	:	Rp -					
						Belanja bantuan sosial	:	Rp -					
						Belanja modal	:	Rp -					
						Belanja tidak terduga	:	Rp -					
						Belanja transfer	:	Rp -					

		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Kab. Pasuruan	1 Dokumen				Rp 70,000,000	DAU		1 Dokumen	Rp 105,000,000
						Belanja operasi	:	Rp 70,000,000					
						Belanja pegawai	:	Rp -					
						Belanja barang dan jasa	:	Rp 70,000,000					
						Belanja bunga	:	Rp -					
						Belanja subsidi	:	Rp -					
						Belanja hibah	:	Rp -					
						Belanja bantuan sosial	:	Rp -					
						Belanja modal	:	Rp -					
						Belanja tidak terduga	:	Rp -					
						Belanja transfer	:	Rp -					

		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Pasuruan	1 Laporan				Rp 100,000,000	DAU		1 Laporan	Rp 150,000,000
						Belanja operasi	:	Rp 100,000,000					
						Belanja pegawai	:	Rp -					
						Belanja barang dan jasa	:	Rp 100,000,000					
						Belanja bunga	:	Rp -					
						Belanja subsidi	:	Rp -					
						Belanja hibah	:	Rp -					
						Belanja bantuan sosial	:	Rp -					
						Belanja modal	:	Rp -					
						Belanja tidak terduga	:	Rp -					
						Belanja transfer	:	Rp -					

									-				
		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Kab. Pasu ruan	4 Doku men				Rp 155,000,000	DAU		4 Dokume n	Rp 232,500,000
						Belanja operasi	:	Rp 155,000,000					
						Belanja pegawai	:	Rp -					
						Belanja barang dan jasa	:	Rp 155,000,000					
						Belanja bunga	:	Rp -					
						Belanja subsidi	:	Rp -					
						Belanja hibah	:	Rp -					
						Belanja bantuan sosial	:	Rp -					
						Belanja modal	:	Rp -					
						Belanja tidak terduga	:	Rp -					
						Belanja transfer	:	Rp					

								-				
						Total Belanja PD	:	Rp 10,878,589,896				

BAB V

PENUTUP

5.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Kode Program/Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan telah disesuaikan dengan RPD Kabupaten Pasuruan dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan tahun 2024 – 2026 ;
4. Program dan kegiatan yang merupakan usulan langsung dan berasal dari masyarakat (*bottom up*) maupun dari stakeholder terkait pada tahun mendatang diupayakan dapat tertampung lewat musrenbang kecamatan ataupun melalui forum Perangkat Daerah. Baik yang melekat pada anggaran BPBD maupun pada masing-masing dinas/instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Berdasarkan Perda nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan berdasarkan peraturan Bupati Pasuruan nomo 152 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, bersama ini disampaikan adanya kenaikan klasifikasi kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari klaifikasi B menjadi Klasifikasi A sehingga mengakibatkan bertambahnya beban anggaran pada BPBD. Maka mohon berkenan untuk memenuhi kecukupan kebutuhan anggaran dalam Upaya pemenuhan sarana dan prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah guna optimalisasi pelayanan penanggulangan Bencana.

5.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Oleh karena RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi acuan

dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. RPJMD merupakan program dari Pemerintah Daerah yang berisikan rencana dan agenda-agenda pembangunan jangka menengah atau selama 3 (tiga) tahun. Dalam rangka mengaktualisasikan perencanaan dalam RPJMD tersebut menjadi suatu dokumen perencanaan tahunan berupa penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional yang berfungsi untuk memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan, maka BPBD dalam menyusun rencana kerja tahunan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. BPBD berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026. Sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam renstra BPBD diselaraskan dengan tujuan dan sasaran strategis Kabupaten sebagaimana yang dirumuskan dalam RPJMD;
3. Renstra BPBD merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya akan berfungsi dalam penetapan kinerja serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan;
4. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kab. Pasuruan adalah sasaran dan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka BPBD sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan BPBD berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing ;
5. BPBD merumuskan dan menetapkan program dan kegiatan dalam rangka mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Daerah berdasarkan kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan oleh BPBD setiap tahunnya merupakan perwujudan dari pelaksanaan RPJMD yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan selanjutnya.

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT

1. Sumbang saran, pemikiran dan informasi serta dukungan dari berbagai pihak yang terkait (stakeholders) sangat dibutuhkan agar dalam proses pengambilan kebijakan administrasi publik, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran daerah ;
2. Meningkatkan/optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan Perangkat Daerah, sejak pendataan, perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan penyusunan rencana selanjutnya;
3. Meningkatkan peran serta lembaga swadaya masyarakat, ormas, lembaga usaha (swasta) dan lembaga non pemerintah termasuk perguruan tinggi (*Pentahelix*) dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, sehingga mampu menumbuhkembangkan masyarakat yang tanggap, tangkas, tangguh dan mandiri dalam menghadapi bencana yang ada, sedangkan pemerintah daerah akan berperan sebagai koordinator, motivator dan fasilitator;
4. Peningkatan penguatan kapasitas masyarakat khususnya yang berada pada wilayah/ daerah rawan dan berpotensi bencana, sehingga menjadi masyarakat yang semakin tanggap, tangkas dan tangguh dalam menghadapi dan menangani bencana, dengan cara mengembangkan dan meningkatkan segala kemampuan/daya upaya yang ada, baik kapasitas SDM, kelengkapan dan ketersediaan sarana prasarana serta adanya dukungan dana dan partisipasi semua pihak terkait kebencanaan (LSM/ Ormas/ Lembaga Usaha) pada semua tahapan penanggulangan bencana.

Pj. BUPATI PASURUAN

Dr. ANDRIYANTO, S.H., M.Kes.